

## DAFTAR PUSTAKA

- Artina, N. (2022). Pengaruh Tenaga Kerja Indonesia, Remitansi, Dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis Universitas Multi Data Palembang*, 11(2), 338–357.
- Badan Pusat Statistik *Provinsi Jambi Dalam Angka, Realisasi pendapatan asli daerah Provinsi Jambi*.
- Brown (2019). Inflasi dan pertumbuhan ekonomi.
- Dainty, G., Roring, J., Kumenaung, A. G., Lopian, A. L. C. P., & Ratulangi, U. S. (2020). *PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENDIDIKAN TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA ( TPT ) 4 KOTA DI PROVINSI SULAWESI UTARA*. 20(4), 70–87.
- Dinureja, M. F., & Sofiyat, A. I. (2024). *PERAMALAN INFLASI UMUM DI INDONESIA TAHUN 2024 MENGGUNAKAN MODEL ARIMA*. 2, 21–29.
- Fitria. (2022). *analisis kinerja pengelolaan keuangan daerah pada kabupaten labuhan batu utara*. 3, 740–749.
- Hidman. (2022). analisis faktor faktor yang mempengaruhi kemiskinan di provinsi sulawesi utara. *Berkas Ilmiah Efisiensi*, 22(8), 85–96.
- Mardiasmo. (2001). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Manoy, M. B., Rotinsulu, T. O., & Rompas, W. F. I. (2017). Pengaruh Variabel Makroekonomi Terhadap Perilaku Inflasi Di Indonesia Periode 2007.1–

- 2016.4. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 17(02), 118–129.
- Siahaan. (2013). *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Edisi Revisi.
- Prakosa, K. P. (2005). *Pajak daerah dan retribusi daerah* (Ed. Revisi). Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Prawoto, A. (2011). *Pengantar keuangan publik*. Yogyakarta: BPFE
- Putri, O. H. (2022). *Produk Domestik Regional Bruto Dan Jumlah Pengangguran Terhadap Garis Kemiskinan Di Kabupaten Muaro Jambi*. *Yudishtira Journal : Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside*, 2(3), 338–348. <https://doi.org/10.53363/yud.v2i3.45>
- Samudra, A. A. (2015). *Perpajakan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali.
- Siahaan, M. P. (2005). *Pajak daerah dan retribusi daerah*. Jakarta: Rajawali.
- Suparmoko, M. (2002). *Ekonomi publik untuk keuangan dan pembangunan daerah*. Yogyakarta: Andi Offset
- Tambunan, T. (2017). *Retribusi daerah dan pertumbuhan ekonomi*
- Undang-undang Republik Indonesia. (2000). *Undang-undang RI No.34 Tahun 2000 tentang pajak dan retribusi daerah*.
- Undang-undang Republik Indonesia. (2009). *Undang-undang RI No.28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah*.
- Undang-undang Republik Indonesia. (2004). *Undang-undang RI No.33 Tahun 2004 tentang pajak dan retribusi daerah*.